

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA

ANALYSIS OF THE DETERMINANS OF PROVERTY IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE

Charmila Pattimura^{1*}, ²

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
Email: charmila1900010192@webmail.uad.ac.id

Article History

Received : diisi oleh editor
Revised : diisi oleh editor
Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author
Email :

Abstrak

Penelitian ini mengkaji upah minimum, pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan. Terhadap tingkat kemiskinan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Data yang di gunakan merukana data panel dengan data cross-section yang terdiri dari 5 kabupaten /kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan time series dengan kurun waktu 2013-2022. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh secara simultan maupun parsial dari upah minimum, pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan terhadap analisis determinan kemiskinan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan merupakan regresi data panel, adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect Model. Hasil uji F menyatakan bahwa seluruh variabel independen, yaitu upah minimum, pengeluaran pemerintah, pendidikan, dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh dan variabel pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: upah minimum kabupaten, pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan

Abstract

This research examines the influence of minimum wages, government spending, education and health on proverty of Yogyakarta. The data used is panel data with cross-section data consting of 5 districts / cities in the special region of Yogyakarta province and time series data for the period 2013-2022. This research will discuss the simultaneous and partial influence of minimum wages, expenditure government, education and health on poverty levels in the analytical method used is panel data regression, while the model used in this research is the fixed effect model. The result of the f test state that all independent variables, namely minimum wages, government spending, education and health simultaneously influence the proverty level in the special region of Yogyakarta.

Key words: district minimum wage, government spending, education, and health.

1. PENDAHULUAN/*BACKGROUND*

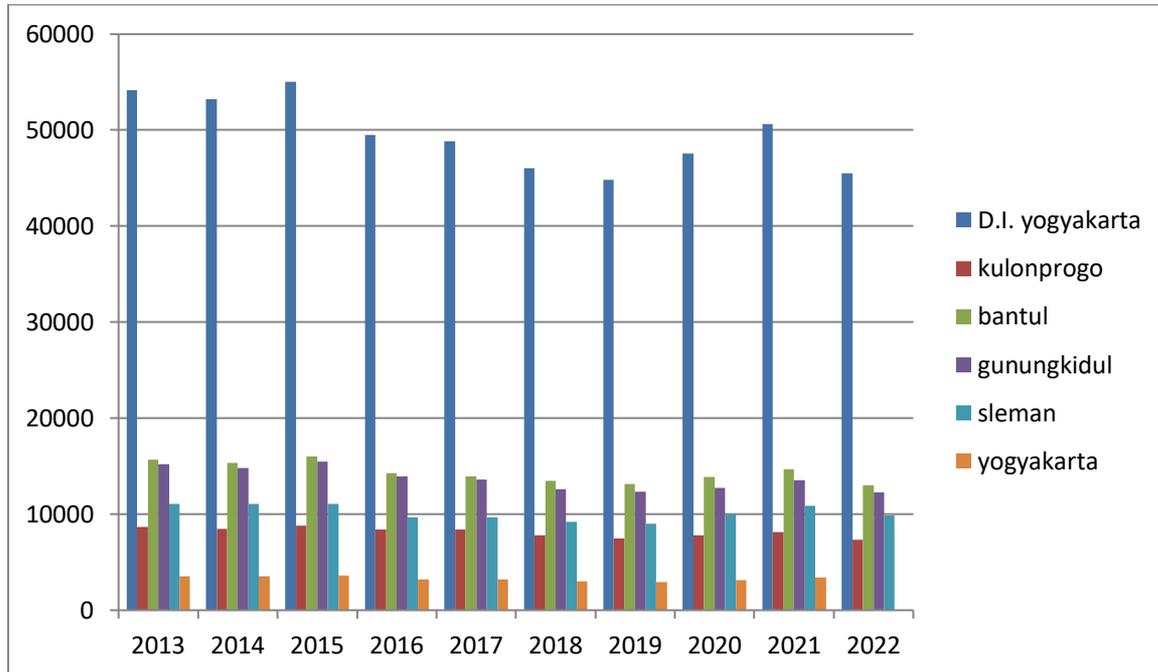
Salah satu tujuan utama negara ialah mencapai kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat, dengan pembangunan ekonomi menjadi satu hal yang dilakukan pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan. Salah satu strategi untuk diterapkan adalah mengalokasikan pembangunan ekonomi ke daerah-daerah yang kesejahteraan cukup dibawah, dengan mengukur keberhasilannya terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam pemilihan sektor fokus atau sektor andalan pembangunan nasional efektivitas, dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi kriteria utama, sebagaimana diungkapkan oleh Simatupang pada tahun 2003. (Simatupang, 2003).

Kemiskinan merupakan isu yang tak terhindarkan dalam suatu wilayah, dan pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak kemiskinan yang dapat menghambat pembangunan. Badan Statistik (2021) mencatat bahwa kemiskinan timbul akibat ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan pendekatan kebutuhan dasar untuk landasan. Kelemahan ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, mengakibatkan penurunan produktivitas dan upah, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan nasional suatu wilayah (Astuti & Lestari, 2018) maka dari itu pengentasan kemiskinan merupakan isu yang harus mendapatkan perhatian serius.

Kemiskinan (*poverty*) tetap menjadi fenomena sosial yang menghantui di beberapa negara berkembang, tentunya di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi kompleksitas dan multi dimensi dalam permasalahan kemiskinan. Sehingga beberapa kegiatan kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan terpadu, namun pengentasan kemiskinan tetap dilaksanakan dengan menyeluruh (Nasir dkk 2008).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki isu kemiskinan yang cukup tinggi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. isu tersebut disebabkan oleh tingkat kemiskinan di Daerah kabupaten/kota DIY lebih meningkat daripada oleh angka kemiskinan provinsi maupun tingkat kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tercatat terus-menerus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa (BPS DIY, 2020). Berdasarkan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY (2019) menjelaskan bahwa kemiskinan di DIY disebabkan oleh rendahnya investasi pada industri padat karya, infrastruktur yang belum merata, serta belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi
DIY dan Nasional, 2013–2022 (persen)**



Sumber : databps

Berdasarkan Gambar 1.1, angka kemiskinan beberapa kabupaten/kota di DIY lebih meningkat daripada angka kemiskinan provinsi maupun nasional. Selain itu, seperti yang dilansir oleh BPS DIY (2022) bahwa tingkat kemiskinan kabupaten yang berada di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu DIY dan bantul cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten di wilayah utara, yaitu Sleman dan kulonprogo. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut perlu dilakukan upaya untuk mencari determinan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat memiliki pedoman dalam mengentaskan kemiskinan.

Gambar 1.1 menunjukkan secara umum tingkat kemiskinan terus mengalami rendahnya mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022, tetapi tidak pada tahun 2015 yang justru mengalami peningkatan. Adanya fakta tersebut bermakna bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta rupanya memiliki dampak yang positif. Walaupun begitu, dapat dilihat bahwa antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup jelas. Tingkat kemiskinan tertinggi di DIY ditemukan di DIY dan selanjutnya di Kabupaten bantul, hal ini sesuai dengan keadaan geografis yang umumnya

didominasi sektor pertanian dengan penghasilan yang rendah sehingga masyarakat tidak dapat meraih standar kebutuhan hidup. Hal di atas berlawanan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang memegang tingkat kemiskinan terendah di DIY dikarenakan berada di wilayah perkotaan yang mana ketersediaan dan kemudahan akses infrastruktur membantu dalam kegiatan maupun kebutuhan hidup masyarakat (Suryandari, 2018).

Berdasarkan dari latar belakang yang ditulis di atas, penelitian memiliki keterkaitan untuk meneliti penelitian yang judul **“PENGARUH UPAH MINIMUM, PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA TAHUN 2013-2022”**.

1. METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu satu variabel dependen (terikat) dan empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sedangkan variabel independen yang digunakan adalah upah minimum, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang telah dipublikasi oleh instansi tertentu. Kabupaten/Kota dengan objek kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik instansi Pemerintah maupun Swasta, misalnya: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, Survey Riset Indonesia, dan lain-lain). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series data periode 2013.1-2022.4. Adapun data yang diambil yaitu Tingkat Kemiskinan (Y), upah minimum (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) Sektor Pendidikan (X3), Sektor Kesehatan (X4). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang digunakan dari Badan Pusat Statistik, maupun website resminya.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan kuantitatif. Data panel yaitu data yang terdiri dari perilaku beberapa objek tertentu dalam berbagai periode waktu (Widarjono, 2018). Pada penelitian ini, dalam melakukan analisis regresi data panel akan dilakukan menggunakan program Eviews 12. Sesuai dengan definisi dari data panel, maka penelitian ini akan menganalisis dengan objek lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2013 hingga 2022

Persamaan model pada penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}.$$

Di mana:

Y = Tingkat Kemiskinan (%)

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien

X_1 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)

X_2 = pengeluaran pemerintah (dalam juta rupiah)

X_3 = Rata-rata Lama Sekolah (satuan tahun)

X_4 = jumlah puskesmas (satuan tahun)

i = 5 Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

t = Tahun 2013-2022

e = Error terms

2. HASIL DAN PEMBAHASAN/*RESULTS AND DISCUSSION* Hasil Dan Pengolahan

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	prob
Cross-section F	26.397982	(4,40)	0.0000

Berdasarkan pengujian diatas ddiperoleh nilai dari probabilitas atas cross-section F yaitu $0.0000 < \alpha 0.05\%$. sehingga berdasarkan dihasil ujichow yaitu penggunaan model terbaik oleh fixed effect karena hipoteis H_0 ditolak

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f	prob
Cross-Sections random	105.591928	4	0.0000

Sesuai pada hasil pengujian maka diperoleh nilai dari probabilitasnya dari cross-section random $F > \alpha 0.05\%$ Sehingga didapati hasil pengujian yaitu, hipotesis H0 ditolak, sehingga penggunaan model fixed effect paling baik.

Berdasarkan hasil dari uji hausman serta uji chow diatas, maka telah dipilih penggunaan model paling baik dalam menganalisi yaitu fixed effect model.

Tabel 4.6 Hasil Regresi Model Fixed Effect

variabel	coefficient	Std. error	t-statistic	prob
C	-27738.83	5997.983	-4.624694	0.0000
X1	-0.002309	0.000427	-5.403200	0.0000
X2	-8.37E-05	0.000140	-0.596427	0.5543
X3	1354.809	297.4843	4.554220	0.0000
X4	1209.280	151.4355	7.985445	0.0000
R-squared	0.966068			
Adjusted R-squared	0.959282			
F-statistic	142.3536			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan estimasi model fixed effect di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -27738.83 - 0.002309X1 - 8.37E-05X2 + 1354.809X3 + 1209.280X4 + \epsilon$$

Di mana:

$X1$ = Upah minimum kabupaten/kota (rupiah),

X_2 = pengeluaran pemerintah (juta rupiah),

X_3 = rata-rata lama sekolah (tahunan),

X_4 = jumlah puskesmas (satuan),

ε = Error terms.

Berdasarkan hasil regresi dan hasil uji hipotesis di atas, maka didapatkan interpretasi sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota diketahui negative dan signifikan dengan nilai prob. sebesar 0.0000 terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berarti setiap kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1 rupiah akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar - 0.002309 juta rupiah.
2. Variabel pengeluaran pemerintah sebesar -8,37E-05 dengan nilai prob. 0,5543. Hal ini menunjukkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Variabel pendidikan diketahui positif dan signifikan dengan nilai prob. sebesar 0.0000 terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berarti setiap kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1354.809 tahunan.
4. Variabel diketahui positif signifikan dengan nilai prob. sebesar 0.0000 terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berarti setiap kenaikan banyaknya jumlah puskesmas sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1209.280 satuan.
5. Koefisien Determinasi (R^2)

• Koefisien determinasi (R^2)

digunakan untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel-variabel independen (upah minimum, pengeluaran pemerintah, pendidikan,

dan kesehatan kabupaten/kota) dalam menjelaskan variabel dependen (tingkat kemiskinan) dalam penelitian. Hasil regresi model fixed effect mendapati bahwa nilai R^2 sebesar 0.966068, yang bermakna bahwa variabel dependen (tingkat kemiskinan) dapat dijelaskan oleh variabel independen (upah minimum, pengeluaran pemerintah, pendidikan, dan kesehatan kabupaten/kota) sebesar 96.61% dan sisanya sebesar 3.39% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

• Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji f-statistik merupakan pengujian secara bersamaan antara variable independent dan variable dependent. Pengujian ini dilakukan guna dapat mengetahui besarnya pengaruh variable independent secara keseluruhan terhadap variable dependent. Berikut cara untuk mendapatkan hasil F-tabel :

$$F\text{-hitung} = 0.966068$$

$$F\text{-tabel} = k - 1$$

$$= 5 - 1 = 4$$

$$= n - k$$

$$= 49 - 4$$

$$= 45$$

Sehingga didapati hasil bahwa F-tabel sejumlah 2.58. Adapun hasil mealui parsial yang dapat dilihat di tabel ini :

Tabel 4.7 Uji F (Uji Simultan)

variabel	f-hitung	f-tabel	prob
Efek Cross Section	0.966068	2.58	0.0000
Efek Time Series	142.3536		

Berdasarkan hasil pengujian serentak pada tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0.966068, dengan $\alpha(5\%)$, $k=4$ dan $n=49$ maka nilai f table 2.58. dengan hasil yang sudah

diketahui terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka tidak ada alasan untuk menolak H_0 . Artinya variable independen (upah minimum, pendidikan, kesehatan) secara bersama memiliki pengaruh yang signifikan kepada variable dependen (kemiskinan) baik cross section maupun time series.

•Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji t ataupun uji parsial ialah tahap dalam menguji seberapa berpengaruh suatu variable independent terhadap variable dependent dengan asumsi variable independen yang lain konstanta atau tetap. Penggunaan uji t ini agar dapat melihat perbedaan antara nilai t-statistic dan nilai t-tabel, adapun ketentuan ketika mengambil kesimpulan pada pengujian ini yakni apabila t-tabel lebih besar dari t-hitung artinya menerima H_0 sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan diantara variable independen kepada variable dependen. Sedangkan apabila t-tabel lebih kecil dari t-hitung artinya menerima H_1 sehingga ada pengaruh signifikan diantara variable independen kepada variable dependen.

Untuk mencari df pada uji t yaitu :

$$df = \{\alpha; (n-k)\}$$

$$df = \{0.05; (49-5)\}$$

$$df = [0.05; (44)\}$$

$$df = 1.680230$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan df diatas, sehingga didapati t-tabel sejumlah 1.680230

Tabel 4.8 Uji T (Uji Parsial)

variabel	t-statistik	t-tabel	prob	keterangan
Upah minimum	-5.403200	1.680230	0.0000	signifikan
Pengeluaran pemerintah	-0.596427	1.680230	0.5543	Tidak signifikan

pendidikan	4.554220	1.680230	0.0000	signifikan
kesehatan	7.985445	1.680230	0.0000	signifikan

Tabel 4. 9 Koefisien Intersep Cross Effect

Kabupaten/ kota	Effect
Kulonprogo	4.754140
Bantul	-6.352452
Gunungkidul	-5.636321
Sleman	-5.337334
Yogyakarta	6.571966

Persamaan regresi:

a. Kota Yogyakarta

$$Y = -27738.83 + 6.571966 - 0.002309 X1 - 0.0000000000000837 X2 + 1354.809 X3 + 1209.280 X4$$

$$Y = -30.296,349$$

b. Kabupaten sleman

$$Y = -27738.83 - 5.337334) - 0.002309 X1 - 0.0000000000000837 X2 + 1354.809 X3 + 1209.280 X4$$

$$Y = -30.308,2586$$

c. Kabupaten gunungkidul

$$Y = -27738.83 = 5.636321) - 0.002309 X1 - 0.0000000000000837 X2 + 1354.809 X3 + 1209.280 X4$$

$$Y = -30.308,5576$$

d. Kabupaten kulonprogo

$$Y = -27738.83 + 4.754140) - 0.002309 X1 - 0.0000000000000837 X2 + 1354.809 X3 + 1209.280 X4$$

$$Y = -30.298,1671$$

e. Kabupaten bantul

$$Y = -27738.83 - 6.352452 - 0.002309 X1 - 0.00000000000000837 X2 + 1354.809 X3 + 1209.280 X4$$

$$Y = -30.309,2737$$

Tabel 4.9 menunjukkan koefisien cross effect yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan dari yang tertinggi hingga terendah di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koefisien cross effect Kota Yogyakarta sebesar 6.571966, Kabupaten Sleman sebesar -5.337334, Kabupaten Gunung Kidul sebesar -5.636321, Kabupaten Kulon Progo sebesar 4.754140, dan Kabupaten Bantul sebesar -6.352452.

• **Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Period Effects**

Persamaan estimasi dengan memasukkan period effects didapatkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan estimasi dan koefisien pada period effects yang mana koefisien cross effects sendiri berjumlah periode yang digunakan dalam analisis regresi.

Tabel 4. 11 Koefisien Intersep Period Effects

tahun	effects
2013	7,54073
2014	6,56184
2015	5,582252
2016	2,154656
2017	0,227878
2018	-2,781942
2019	-5,030598
2020	-6.71409
2021	-7.041487
2022	-7,152376

Berdasarkan hasil estimasi period effects, didapatkan nilai koefisien period effects tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 7,54073 yang berarti tingkat kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada tahun 2013. Adapun nilai period effects terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar - 6,714093 yang berarti tingkat kemiskinan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada tahun 2020.

Analisis Ekonomi

1. Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan

- (a) Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah variabel independen (X_1) yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel upah minimum kabupaten/kota diketahui memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang signifikan terhadap alpha (α) = 5% dan hubungan negatif dengan koefisien regresi sebesar -0.002309. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan upah minimum berpengaruh terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan teori dan hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
- (b) Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama yang dilakukan oleh (AkinOlagunju et al., 2019) bahwa upah minimum memiliki pengaruh pada pengurangan angka kemiskinan, di mana ketika upah minimum meningkat baik di sektor formal maupun informal akan memungkinkan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Penelitian tersebut juga memberikan hasil ketika semakin tinggi upah minimum yang diberikan semakin tinggi pula angka kemiskinan akan menurun. Penduduk miskin akan menerima pendapatan yang lebih tinggi jika upah minimum meningkat sehingga daya beli penduduk miskin akan meningkat dan diikuti oleh

2. Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

(a) Variabel pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah variabel independen (X_2) yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pengeluaran pemerintah diketahui memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5543 yang tidak signifikan terhadap alpha (α) = 5% dan hubungan negatif dengan koefisien regresi sebesar -0000000000000837. Dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sector pekerjaan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena infrastruktur dinilai tidak berdampak terhadap masyarakat miskin. Selain itu, pembangunan hanya berpusat pada daerah yang memiliki infrastruktur yang baik saja, yaitu di daerah perkotaan, kabupaten atau tempat yang dianggap strategis. Sedangkan, focus pembangunan belum menyentuh ke pelosok desa. Padahal sebagian besar penduduk miskin lebih banyak bermukim di daerah pelosok desa.

3. Analisis pengaruh pendidikan Tingkat Kemiskinan

(a) Variabel pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah variabel independen (X_3) yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pendidikan diketahui memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang signifikan terhadap alpha (α) = 5% dan hubungan negatif dengan koefisien regresi sebesar 1354.809. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan teori dan hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

(b) Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arsyad (2016) mengatakan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan

produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

4. Analisis Pengaruh kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

- (a) Variabel kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah variabel independen (X_4) yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel kesehatan diketahui memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang signifikan terhadap $\alpha = 5\%$ dan hubungan negatif dengan koefisien regresi sebesar 1209.280. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan tingkat kesehatan berpengaruh terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan teori dan hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
- (b) Rahmawati Faturrohim (2011) yang memperoleh hasil bahwa Angka Harapan Hidup memiliki hubungan yang negatif dan signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut meningkat. Dengan penduduk yang sehat maka produktivitas akan meningkat pula. Meningkatnya produktivitas penduduk akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan di wilayah tersebut juga meningkat.

3. KESIMPULAN/*CONCLUSIONS*

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Upah Minimum Kabupaten/Kota, pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan

terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” didapatkan kesimpulan bahwa variabel UMK, pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan. secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013 hingga 2022. Apabila dilihat secara parsial, sedangkan variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota, pendidikan, kesehatan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten DIY dan bantul, sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Kabupaten Sleman dan kulonprogo.

- a. Dari hasil-hasil pengujian pada hipotesis penelitian variable Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya ketika tingkat UMK naik yang diakibatkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) agar kesejahteraan pekerja tetap terjamin maka dapat mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- b. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun pengeluaran pemerintah atau konsumsi belanja pemerintah tidak secara langsung dapat dirasakan pada tahun yang bersangkutan. Hal ini mengartikan pengeluaran pemerintah itu terjadi. Misalnya pengeluaran pemerintah pada sector infrastuktur, manfaat baru dapat di rasakan setelah proyek infrastruktur itu selesai dan dapat digunakan masyarakat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Dalam penelitian ini menunjukkan pendidikan belum mampu secara efektif menurunkan angka kemiskinan hal ini dikarenakan banyak penduduk yang memiliki rata-rata lama

sekolah hanya sekitar lulusan Sekolah Menengah Pertama. Karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama golongan miskin. Pemerintah perlu mengoptimalkan program bantuan kepada siswa miskin sehingga dapat membantu mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal. Melalui pendidikan formal, ini dapat dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun harus dioptimalkan agar penduduk dapat menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA. Sedangkan melalui pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan memberikan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru, dan lain sebagainya.

- d. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan tingkat kesehatan agar Angka harapan hidup penduduk terus meningkat. Hal ini akan menunjang aktivitas produksi sehingga pendapatan yang diperoleh lebih maksimal dan kemiskinan akan berkurang. Kebijakan dibidang kesehatan dapat dilakukan dengan memperluas jaminan kesehatan seperti BPJS khususnya bagi penduduk yang bermukim di wilayah pedalaman sehingga peningkatan kesehatan dapat dilakukan secara merata.

4. UCAPAN TERIMA KASIH/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Azizah Az Zakiyyah S.E., M.Sc. yang sudah bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi dan senantiasa memberikan arahan dari awal hingga akhir, serta menjadi pendengar sekaligus penyemangat yang baik. Thank You for being a good lecturer. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk para tuan dan puan yang mendukung saya sedari awal menemani saya. Yang pertama adalah yang sudah seperti saudara sendiri yaitu Tiara, Cipi, Illa, Risqi, Kemal, Rama, Wayan yang selalu membantu dan menemani saya, Kemudian Kerabat ekonomi pembangunan yaitu Puja, Diki, Alina, Memed.

yang selalu mendukung saya. Serta seluruh Kerabat KKN, Kerabat UAD, dan Kerabat Jogja lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Thank You.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Akhir, S., Idris, & Yulhendri. (2019). Analysis of The Effect of Education Level, Economic Growth, and Unemployment Rate on The Poverty Rate In Sumatera Barat, Indonesia BT - Proceedings of the Third Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, A.714–719.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/piceeba-19.2019.14>
- Akin-Olagunju, O. A., Akinribido, B., & Yusuf, S. A. (2019). Poverty Effects of Minimum Wage Increase in Nigeria. *Developing Country Studies*, 9(11), 19–29.
<https://doi.org/10.7176/DCS/9-11-03>
- Arabyat, Y. A. (2017). The Impact of Foreign Direct Investment on Poverty Reduction in the Developing Countries. *International Finance and Banking*, 4(2), 92–111. <https://doi.org/10.5296/ibf.v4i2.11987>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021.
- Bappeda DIY. (2019). Laporan Akhir Kajian Pendahuluan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan.
- Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi.
- BPS DIY. (2020). Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka

2017. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka
2018. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka
2019. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka
2020. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka
2021. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka
2022. Provinsi D.I. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta
- Giyanti Permata Dewi, I. (2015). ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN, PDRB DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939–948.
- Kurniawati, A., Gunawan, B. T., & Indrasari, D. P. R. (2017). Dampak upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 17(2), 233–252.
- Minggu, T. D., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Mustamin, S. W. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, 4(2), 165–173.
- Nugroho, S. S. (2015). The roles of basic infrastructure on poverty alleviation in Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1), 27–44.
- Safitri, R., Baihaqi, J., & Supriyadi, S. (2020). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *IQTISHODUNA*, 16(1), 39–58.

- Sari, N. P. (2018). Minimum Wage Implications and Poverty Numbers East Java Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 1–9.
- Sudirman, S., & Andriani, L. (2017). Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 148–159.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru (Pertama)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hakimudin, D. R. (2010). *Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007*. Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Faturrohmin, R. (2011). *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup, Dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasir, M. M. Saichudin & Maulizar. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi: Jakarta.
- Sitepu, R. K. & Bonar M. S. (2004). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Dikutip dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=86291&val=245>
Diakses tanggal 11 Januari 2017
- Niswati, K. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. *Ekonomi regional* Vol. 9, No.2, September 2014. Universitas Jenderal Soedirman.
- Permana, A.Y. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Tambunan, T. (2014). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dinkes. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

